

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI, REKOMENDASI DAN DALIL

6.1. Simpulan

Berdasarkan pada Bab IV Temuan Penelitian dan Bab V Pembahasan Penelitian yang telah dilakukan terkait pengembangan keadaban digital warganet Indonesia melalui aplikasi *Smart Citizen* dalam perspektif *citizenship education*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan umum sebagai berikut.

Penelitian ini menggambarkan bahwa keadaban digital warganet Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penyebaran hoax, cyberbullying, dan pelanggaran privasi, yang menunjukkan perlunya upaya peningkatan kesadaran dan perilaku digital yang lebih bertanggung jawab. Temuan penelitian mengungkapkan adanya hubungan signifikan antara pendidikan kewarganegaraan digital dan peningkatan keadaban digital warganet melalui implementasi aplikasi *Smart Citizen* untuk mengembangkan keadaban digital. Disertasi ini juga membahas tantangan dalam implementasi aplikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan kurikulum serta integrasi teknologi dalam pembelajaran kewarganegaraan digital. Sehingga hal ini menegaskan pentingnya pendidikan kewarganegaraan digital dalam meningkatkan keadaban digital warganet Indonesia. Secara keseluruhan, disertasi ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik kewarganegaraan digital di Indonesia, serta menawarkan arah bagi penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain dari keadaban digital dan dampak jangka panjang penggunaan aplikasi dalam konteks yang lebih luas.

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengembangkan dan menguji efektivitas aplikasi *Smart Citizen* dalam meningkatkan keadaban digital warganet Indonesia melalui pendekatan *Citizenship Education*, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan khusus sebagai berikut..

1. Gambaran keadaban digital warganet Indonesia. Hasil studi pendahuluan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan survei, gambaran umum keadaban digital warganet Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat

tantangan signifikan dalam hal perilaku online. Banyak warganet yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keadaban digital, yang tercermin dari praktik-praktik seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, kurangnya penghormatan terhadap privasi orang lain, dan perilaku yang tidak etis di media sosial. Hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan pendidikan kewarganegaraan digital yang dapat membantu warganet mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan etika dalam interaksi digital.

2. Pengembangan Aplikasi *Smart Citizen* dalam Mengembangkan Keadaban Digital Warganet Indonesia dalam Perspektif *Citizenship Education*. Pengembangan aplikasi *Smart Citizen* dirancang untuk mengatasi tantangan keadaban digital yang dihadapi oleh warganet Indonesia. Melalui metode riset dan pengembangan tipe ADDIE, aplikasi ini dikembangkan dengan landasan teori-teori pendidikan seperti konstruktivisme dan behaviorisme, yang bertujuan untuk mendorong pembelajaran aktif dan *reinforcement* perilaku digital yang positif. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur edukatif, seperti *self-assessment*, ruang edukasi, dan forum diskusi, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang nilai-nilai keadaban digital. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai platform edukasi yang berfokus pada pengembangan kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab.
3. Efektivitas Penerapan Aplikasi *Smart Citizen* dalam Mengembangkan Keadaban Digital Warganet Indonesia dalam Perspektif *Citizenship Education*. Evaluasi terhadap penerapan aplikasi *smart citizen* menunjukkan bahwa aplikasi ini efektif dalam meningkatkan keadaban digital warganet Indonesia. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku dan pemahaman pengguna terkait keadaban digital setelah menggunakan aplikasi ini. Pengguna menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab dalam interaksi digital mereka. Dengan pendekatan berbasis teori pendidikan dan pengumpulan data yang komprehensif, aplikasi *Smart Citizen* dapat membantu dalam mengajarkan nilai-nilai keadaban digital seperti

integritas, empati, dan tanggung jawab, yang esensial untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih baik dan lebih aman.

6.2. Implikasi

6.2.1. Implikasi Teoritis

a. Penguatan Teori Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Digital.

Temuan penelitian ini dapat memperkuat teori pendidikan kewarganegaraan dengan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kewarganegaraan tradisional, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan integritas, tetap relevan dan bahkan krusial dalam konteks digital. Dengan mengintegrasikan teori-teori pembelajaran seperti konstruktivisme dan behavioristik, penelitian ini menegaskan bahwa pembelajaran kewarganegaraan dapat diperluas untuk mencakup aspek-aspek digital, yang mendidik individu tidak hanya sebagai warga negara dalam dunia fisik tetapi juga sebagai warga negara digital yang bertanggung jawab.

b. Kontribusi terhadap Pengembangan Kerangka Pendidikan Kewarganegaraan Digital.

Temuan penelitian mendukung pengembangan kerangka pendidikan kewarganegaraan digital yang lebih holistik. Dalam kerangka ini, elemen-elemen seperti menghormati diri sendiri dan orang lain, mendidik diri sendiri dan orang lain, serta melindungi diri sendiri dan orang lain dalam interaksi online, menjadi bagian integral dari kurikulum kewarganegaraan. Ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan program pendidikan kewarganegaraan digital yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, yang mampu membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat digital.

6.2.2. Implikasi Praktis

1. Pengembangan Aplikasi Edukatif Lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pengembangan aplikasi seperti *Smart Citizen* dapat digunakan sebagai acuan untuk aplikasi edukatif lainnya, baik di bidang pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan etika digital secara umum. Institusi pendidikan dan pengembang aplikasi dapat menerapkan pendekatan serupa untuk mengembangkan alat pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan literasi digital dan keadaban digital di masyarakat.

2. Strategi Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Digital.

Aplikasi *Smart Citizen* dapat dijadikan model bagi strategi implementasi pendidikan kewarganegaraan digital tidak hanya di komunitas masyarakat, tetapi juga dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan universitas. Penggunaan teknologi yang terintegrasi dengan teori pendidikan dapat meningkatkan efektivitas program literasi digital dan mendorong partisipasi subyek dalam pembelajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman .

3. Penerapan dalam Kurikulum Pendidikan Formal.

Penelitian ini mengimplikasikan bahwa pendidikan kewarganegaraan digital harus diintegrasikan secara formal ke dalam kurikulum pendidikan di berbagai jenjang. Pada kurikulum yang baru diharapkan terdapat unsur literasi digital dan penggunaan *artificial intelligent* (AI) namun tetap berfokus pada penguatan karakter, nilai, dan moral individu. Ini akan memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan tentang literasi digital sejak dini, sehingga dapat mempersiapkan mereka untuk berinteraksi secara etis dan bertanggung jawab dalam dunia digital. Institusi pendidikan disarankan untuk mengadopsi pendekatan ini, dengan menggunakan teknologi dan aplikasi edukatif yang relevan sebagai alat bantu pembelajaran.

6.3. Rekomendasi

Berikut adalah rekomendasi dari penelitian ini yang disusun untuk berbagai pihak yang relevan:

6.3.1. Bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Pengembangan kebijakan nasional tentang Pendidikan Kewarganegaraan Digital. Disarankan agar pembuat kebijakan mengembangkan kebijakan nasional yang mendukung pendidikan kewarganegaraan digital di semua jenjang pendidikan. Kebijakan ini harus mencakup integrasi literasi digital dan pendidikan keadaban digital ke dalam kurikulum formal dan informal.
2. Dukungan pada pengembangan teknologi edukatif. Pemerintah perlu menyediakan dukungan berupa pendanaan, regulasi, dan insentif bagi pengembang aplikasi edukatif seperti *Smart Citizen*. Kebijakan ini akan mendorong inovasi dalam pendidikan kewarganegaraan digital dan memastikan ketersediaan alat yang efektif untuk meningkatkan keadaban digital masyarakat.

3. Kementerian harus memfasilitasi kampanye nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keadaban digital. Kampanye ini dapat mencakup kolaborasi dengan media, sekolah, dan sektor swasta untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
4. Kementerian dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan regulasi dan kebijakan yang mendorong implementasi pendidikan kewarganegaraan digital di semua jenjang pendidikan. Kebijakan ini harus mendukung pengembangan dan penggunaan aplikasi edukatif yang dapat membantu membentuk warga digital yang beradab dan bertanggung jawab.
5. Disarankan untuk mengembangkan standar nasional atau internasional mengenai pendidikan kewarganegaraan digital yang dapat diadopsi oleh institusi pendidikan dan organisasi lain yang bergerak di bidang literasi digital.
6. Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Digital dalam kurikulum. Institusi pendidikan disarankan untuk mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum formal. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi edukatif seperti *Smart Citizen* sebagai alat bantu pengajaran yang efektif.
7. Pelatihan guru dan tenaga pendidik. Guru dan tenaga pendidik perlu dilatih tentang cara mengajarkan kewarganegaraan digital secara efektif. Pelatihan ini harus mencakup penggunaan teknologi pendidikan dan strategi untuk mengajarkan nilai-nilai keadaban digital kepada siswa.
8. Pengembangan sumber daya pembelajaran digital. Dunia pendidikan perlu mengembangkan dan memperbarui sumber daya pembelajaran digital yang relevan dengan perkembangan teknologi terbaru. Ini akan membantu siswa memahami dan mempraktikkan kewarganegaraan digital secara efektif.

6.3.2. Bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

1. Penguatan Kebijakan Transformasi Digital yang Berbasis Pendidikan Kewarganegaraan Digital. Sebagai pengelola pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi, Komdigi perlu mengembangkan kebijakan transformasi digital yang mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan digital sebagai pilar utama. Kebijakan ini harus mengedepankan nilai keadaban

digital, etika, dan tanggung jawab pengguna dalam ruang digital, sesuai dengan temuan disertasi bahwa keadaban digital warganet masih menghadapi banyak tantangan. Pendekatan ini berkontribusi untuk memastikan transformasi digital berjalan tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga nilai sosial dan moral.

2. Perluasan Program Literasi dan Keadaban Digital Nasional. Komdigi memiliki fungsi literasi digital, sehingga sangat relevan untuk memperluas program literasi yang tidak hanya mengedukasi penguasaan teknologi tetapi juga meningkatkan keadaban digital dan kesadaran kritis warganet. Pengembangan aplikasi seperti *Smart Citizen* dapat didorong untuk diadopsi luas sebagai media edukasi yang interaktif dan efektif serta menjadi bagian dari program literasi nasional.
3. Pengawasan Arus Internet Berbasis Etika Digital dan Perlindungan Data Pribadi. Fungsi pengawasan arus internet dan perlindungan data pribadi menjadikan Komdigi berperan penting dalam mengatur tata kelola ruang digital agar lebih beradab. Komdigi dianjurkan mengembangkan regulasi dan sistem pengawasan yang memprioritaskan aspek etika dan perlindungan privasi, sejalan dengan nilai-nilai tanggung jawab digital yang diajarkan melalui aplikasi *Smart Citizen*.
4. Pengembangan Infrastruktur TIK untuk Mendukung Implementasi Aplikasi Pendidikan Digital. Sebagai pengembang infrastruktur TIK, Komdigi perlu memastikan ketersediaan jaringan yang merata dan berkualitas untuk mendukung penggunaan aplikasi pendidikan digital seperti *Smart Citizen* di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, sehingga pemerataan akses ke pendidikan kewarganegaraan digital bisa tercapai.
5. Penerapan Standar Nasional untuk Aplikasi Edukasi Digital yang Mendukung Keadaban Digital. Komdigi dapat mengambil inisiatif menetapkan standar nasional bagi pengembangan aplikasi edukasi digital yang mengedepankan aspek keadaban digital, edukasi kewarganegaraan, dan keamanan siber. Hal ini akan mendorong inovasi teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa.
6. Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Digitalisasi Ekonomi Berbasis Keadaban. Dalam mendukung misi digitalisasi ekonomi, Komdigi juga

disarankan untuk menginisiasi program kolaboratif yang melibatkan sektor pendidikan, teknologi, dan masyarakat untuk mengintegrasikan keadaban digital dalam setiap aspek digitalisasi ekonomi, sehingga tercipta ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

7. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Bidang Digital Beradab. Dalam mendukung fungsi pemerintahan elektronik, Komdigi hendaknya menyelenggarakan pelatihan bagi aparat negara dan pendidik dalam mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan digital dan keadaban digital berbasis aplikasi, agar penyampaian materi lebih efektif dan berdampak luas.

6.3.3. Bagi Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas)

1. Penguatan Peran Wantiknas dalam Pengembangan Ekosistem Digital Beradab. Wantiknas diharapkan menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem digital yang mengedepankan nilai-nilai keadaban digital melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pengembang teknologi.
2. Inisiasi Standarisasi dan Pedoman Pengembangan Aplikasi Edukasi Digital. Mengembangkan pedoman dan standar nasional untuk pengembangan aplikasi teknologi informasi yang memprioritaskan aspek edukasi keadaban digital, etika digital, dan keamanan siber yang dapat diadopsi oleh pengembang aplikasi dan pemangku kepentingan.
3. Fasilitasi Pendanaan dan Dukungan Teknis Inovasi Teknologi Digital untuk Pendidikan. Memberikan fasilitasi pendanaan riset dan pengembangan aplikasi digital inovatif yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan digital, seperti aplikasi Smart Citizen, yang dapat mendorong sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab.
4. Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Beretika. Wantiknas dapat merancang program pelatihan dan sertifikasi bagi para profesional teknologi informasi untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika, literasi digital, dan pengembangan karakter dalam setiap produk dan layanan teknologi yang diciptakan.
5. Penguatan Pengawasan dan Evaluasi Implementasi Teknologi Digital Berbasis Keadaban. Menempatkan mekanisme pengawasan berbasis indikator keadaban

digital untuk mengukur efektivitas dan dampak sosial penggunaan aplikasi serta teknologi digital, guna menjaga agar teknologi tidak hanya maju secara teknis tetapi juga berlandaskan nilai-nilai sosial dan etika.

6. Mendorong Kolaborasi Multistakeholder dalam Pembangunan Budaya Digital Positif. Memfasilitasi kerja sama antara pemerintah, akademisi, praktisi teknologi, dan komunitas digital untuk memperkuat budaya literasi dan keadaban digital melalui berbagai program dan inisiatif bersama yang berkelanjutan.

6.3.4. Bagi Masyarakat

1. Peningkatan kesadaran akan kewarganegaraan digital. Masyarakat diharapkan untuk secara aktif meningkatkan pemahaman mereka tentang kewarganegaraan digital dan pentingnya keadaban dalam interaksi online. Penggunaan aplikasi seperti *Smart Citizen* dapat membantu individu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika digital dalam kehidupan sehari-hari.
2. Partisipasi dalam program literasi digital. Masyarakat perlu terlibat dalam program-program literasi digital yang disediakan oleh pemerintah, sekolah, dan organisasi lainnya. Partisipasi ini penting untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya perilaku yang bertanggung jawab di dunia digital.
3. Penggunaan teknologi dengan bijak. Masyarakat diharapkan untuk menggunakan teknologi secara bijaksana, dengan mempertimbangkan dampak dari tindakan online terhadap diri sendiri dan orang lain. Hal ini termasuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya dan menjaga privasi pribadi serta orang lain.

6.3.5. Bagi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengayaan kurikulum dengan Pendidikan Kewarganegaraan Digital. Program studi keilmuan kewarganegaraan disarankan untuk memperkaya kurikulum mereka dengan materi tentang pendidikan kewarganegaraan digital. Ini mencakup teori, praktik, dan aplikasi nyata dari konsep kewarganegaraan dalam konteks digital.
2. Pengembangan modul pembelajaran berbasis teknologi. Program studi ini harus mengembangkan modul pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital

untuk mengajarkan konsep-konsep kewarganegaraan. Penggunaan aplikasi *Smart Citizen* dapat dijadikan contoh dalam modul-modul tersebut.

3. Kolaborasi dengan sektor teknologi. Disarankan untuk membangun kolaborasi dengan sektor teknologi untuk menciptakan alat-alat edukatif baru yang dapat digunakan dalam pendidikan kewarganegaraan digital. Ini akan memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kebutuhan dunia digital saat ini.

6.3.6 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Eksplorasi lebih lanjut tentang efektivitas teknologi dalam Pendidikan Kewarganegaraan Digital. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana teknologi dapat digunakan secara lebih efektif dalam pendidikan kewarganegaraan digital. Penelitian ini dapat mencakup berbagai konteks budaya dan demografis yang berbeda.
2. Penelitian komparatif tentang aplikasi edukatif. Penelitian komparatif antara berbagai aplikasi edukatif dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang fitur-fitur apa yang paling efektif dalam meningkatkan keadaban digital. Ini dapat membantu dalam mengembangkan aplikasi yang lebih baik di masa depan.
3. Studi jangka panjang tentang dampak Pendidikan Kewarganegaraan Digital. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi jangka panjang yang mengevaluasi dampak pendidikan kewarganegaraan digital terhadap perilaku online di berbagai kelompok masyarakat. Ini akan memberikan data yang lebih mendalam tentang keadaban digital.

6.4. Dalil-Dalil

Berdasarkan hasil analisis reflektif terhadap temuan di lapangan dan teori, peneliti menyusun sejumlah dalil konseptual sebagai berikut.

1. Di dunia modern yang terhubung secara global, keputusan dan tindakan individu memiliki dampak yang lebih luas, warga negara masa kini tidak hanya cukup menjadi “*smart & good*” tetapi juga “*active and responsible*”.
2. Penerapan teknologi edukatif berbasis teori pendidikan, efektif dalam meningkatkan keadaban digital warganet dengan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan digital yang beretika melalui pembelajaran interaktif dan *reinforcement* positif.

3. Integrasi pendidikan kewarganegaraan digital ke dalam kurikulum, berpotensi besar dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran tanggung jawab dan mampu berpartisipasi secara etis dalam ekosistem digital.
4. Pengembangan keadaban digital melalui program pendidikan kewarganegaraan digital yang terstruktur dapat membentuk perilaku warga negara yang lebih beradab dalam interaksi digital, sehingga menciptakan ekosistem digital yang lebih harmonis dan demokratis.
5. Pola konsumsi informasi yang dangkal di kalangan warganet, cenderung mengonsumsi konten singkat dan sensasional tanpa melakukan verifikasi, mengakibatkan reaksi impulsif dan emosional dalam merespons informasi yang diterima.
6. Kesetaraan dan kebebasan dalam akses informasi yang ditawarkan oleh internet, menghadirkan tantangan *bias expertise* yang dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan pengguna.
7. Ketiadaan integrasi *digital citizenship education* dalam sistem pendidikan mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran warga negara terhadap tanggung jawab dan etika digital, berpotensi menyebabkan perilaku digital yang tidak beradab.

6.5. Novelty Penelitian

Dari dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, kemudian peneliti menelaah lebih lanjut sehingga menghasilkan teori yang dapat mewakili dalil tersebut. Adapun penjelasan teori dapat dijelaskan sebagai berikut.

Dalil utama dalam penelitian ini yaitu di dunia modern yang terhubung secara global, keputusan dan tindakan individu memiliki dampak yang lebih luas, warga negara masa kini tidak hanya cukup menjadi “*smart & good*” tetapi juga “*active and responsible*”. Dalil ini merujuk pada kebutuhan bagi individu di era modern yang terhubung secara global untuk tidak hanya menjadi *smart & good*, tetapi juga *active & responsible* dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk berpartisipasi secara aktif dalam isu-isu sosial, politik, dan lingkungan, serta menyadari bahwa setiap tindakan di dunia maya dapat memiliki dampak yang signifikan, baik di tingkat lokal maupun global.

Dengan demikian, pemahaman tentang tanggung jawab individu dalam interaksi digital menjadi sangat krusial.

Warga negara diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai gerakan positif, seperti melawan hoaks, menyuarakan inklusivitas, dan membantu korban perundungan online. Melawan penyebaran informasi yang tidak akurat adalah langkah penting untuk menjaga integritas informasi di dunia digital. Selain itu, menyuarakan pentingnya inklusivitas dan keberagaman dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi semua individu. Di sisi lain, membantu korban perundungan online menunjukkan tanggung jawab sosial yang tinggi, di mana individu tidak hanya peduli terhadap diri mereka sendiri, tetapi juga terhadap kesejahteraan orang lain di komunitas digital.

Kesimpulannya, di dunia yang semakin terhubung, menjadi "*smart & good*" tidak lagi cukup untuk warga negara masa kini. Mereka harus berperan aktif dan bertanggung jawab (*active & responsible*) dalam setiap tindakan yang diambil di dunia digital. Dengan keterlibatan aktif dan kesadaran akan dampak dari tindakan mereka, individu dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih bertanggung jawab, serta menciptakan perubahan positif yang berdampak luas.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat menciptakan nama teori baru yang mencerminkan warga negara yang cerdas, baik, terlibat secara aktif dan bertanggung jawab di dunia digital. Nama teori yang diusulkan adalah *Theory of Comprehensive Citizen* (TCC). Berdasarkan asal kata, *comprehensive* yang berarti 1) mampu menangkap, dan 2) luas dan lengkap, dan kata *citizen* yang berarti warga negara. Sehingga teori ini mengibaratkan luasnya kemampuan dan kompetensi warga negara di dunia digital. Warga negara yang komprehensif adalah warga negara yang menekankan pentingnya peran individu dalam berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab di dunia digital. Teori ini menggarisbawahi bahwa di era informasi yang cepat dan terhubung, warga negara tidak hanya dituntut untuk menjadi "*smart & good*", namun juga harus berperan sebagai "*active & responsible*".

Berikut ini adalah elemen kunci dari warga negara komprehensif.

1. Keterlibatan Aktif.

Pada konteks kehidupan digital, terutama pada interaksi di sosial media, warga negara diharapkan untuk terlibat dalam gerakan positif, seperti melawan hoaks, menyuarakan inklusivitas, dan membantu korban perundungan online.

2. Tanggung Jawab Sosial.

Individu harus menyadari dampak dari tindakan mereka di dunia maya dan bertindak dengan etika serta integritas, berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik.

3. Kesadaran Kolektif.

Teori ini juga menekankan pentingnya kesadaran akan isu-isu sosial, politik, dan lingkungan, serta bagaimana tindakan individu dapat mempengaruhi komunitas secara luas. Dengan demikian, *Theory of Responsible Digital Engagement* memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mendorong partisipasi aktif serta tanggung jawab sosial di dunia digital, menciptakan perubahan positif yang berdampak luas bagi masyarakat.